

Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekarmukti Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang

¹Amelia Lestari Fauzy, ²Angga Saeful Bahri, ³Arip Rahman Sudrajat, ⁴Diana Meilina, ⁵Muhammad Syihabul Haq

¹²³⁴⁵Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

e-mail :¹fauzamel69@gmail.com, ²angga.saefulbah12@gmail.com, ³arip.rs84@gmail.com,

⁴dianameilina1598@gmail.com, ⁵syihab182@gmail.com

Abstrak

Pada saat ini, Sumber Daya Manusia Masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Karenanya, artikel ini membahas memiliki subjek penelitian anggota Bumdes Mekarmukti Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang dengan harapan pengurus Bumdes dapat berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan penulisan ini agar bumdes dapat berjalan yang terkendala oleh sumber daya manusia, harapannya dengan berjalannya bumdes ini adalah dapat mensejahterakan masyarakat sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Kebingungan pengurus bumdes tentang apa yang harus dilakukan dalam mengelola Bumdes adalah permasalahan utama. Kabupaten Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Metode yang dilakukan dalam pemecahan masalah ini adalah dengan mengadakan suatu penyuluhan kepada anggota bumdes melalui kerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang sebagai stakeholder dalam pembinaan desa semakin kuat. Hasil yang diperoleh berupa meningkatnya motivasi pengurus dalam mengelola bumdes, terbukanya *mindset* bahwa apa pun bisa dijadikan bahan untuk usaha Bumdes.

Kata Kunci: sumber daya manusia; bumdes

Analysis of The Village's Small Business (Badan Usaha Milik Desa or BUMDES) Mekarmukti, Buah Dua District, Sumedang Regency

Abstract

At this time, the Indonesian s Human Resources Capacity is still need to be improved. Therefore, this article discussed the members of The Village's Small Business (Badan Usaha Milik Desa or Bumdes) Mekarmukti, Buah Dua District, Sumedang Regency as the subject, It was hoped that the Bumdes administrators work effectively and successfully. The purpose of this paper is that the bumdes can run constrained by human resources, the hope is that by running these bumdes it will be able to prosper the community in accordance with the ideals of the Indonesian people. There was confusion in the bumdes management about what to do in managing Bumdes, and this appeared the major problem The Sumedang Regency will be developed in advance if only all the districts are able to maximize the existing potentials. The economy growth will be sought a strong, resilient and respectable economy if only the competitiveness index is posited at a high level. The method used in solving this problem is to hold a counseling to bumdes members through collaboration with the Community And Village Empowerment Services (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa or DPMD) of Sumedang Regency as a stakeholder in building high developed villages. The results show that there is an increasing of the administrators' motivation in managing Bumdes, and it is proved by the changing mindset that anything can be used as materials for Bumdes business.

Keywords: human resources; bumdes

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keberagamannya, dalam menyatukan keberagamannya Indonesia mempunyai tujuan utama dalam usaha untuk tercapainya kemajuan Negara ini yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah selalu berupaya dalam mewujudkannya, mulai dari tingkat pemerintah pusat, daerah hingga sampai ke Desa.

Dalam hal ini desa menjadi satu langkah penting dalam pencapaian kesejahteraan, dimulai dari Desalah segala tujuan Negara dimulai. Pemerintah Indonesi dengan ini mengeluarkan suatu peraturan mengenai program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan didirikannya bumdes ini diharapkan dapat menjadi suatu cara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kabupaten Sumedang terbagi menjadi 26 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Buah Dua yang terdiri dari berbagai 13 Desa salah satunya adalah Desa Mekarmukti. Wilayah Desa Mekarmukti berada di sebelah Barat Kecamatan Buah Dua dan Desa Mekarmukti terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Ciliang 1, Dusun Ciliang 2 dan Dusun Citunggul, terdiri dari 4 RW dan 17 RT. Desa Mekarmukti merupakan desa yang berada di daerah berbukit, dengan ketinggian antara 274 mdpl (diatas permukaan laut).

Dengan lokasi yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten dan lahan yang dialokasikan sebagai lahan pertanian sangat dominan, tidak mengherankan jika mata pencaharian penduduk Desa Mekarmukti didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Mekarmukti jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hanya sebagian kecil saja yang bermata pencaharian. Sektor pertanian di Desa Mekarmukti didukung oleh lahan pertanian berupa lahan pesawahan dan lahan perkebunan serta ladang. Lahan pesawahan di Desa Mekarmukti masih menggunakan sistem pengairan non teknis. Lahan pesawahannya menghasilkan produk utama berupa padi dengan produktivitas yang cukup.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa, Bupati Sumedang menetapkan petunjuk teknis pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan usaha milik desa (Peraturan Bupati Sumedang, 2018).

Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha desa tersebut meliputi jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat.

Angka Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 (BPS Kabupaten Sumedang, 2018) tergolong dalam kategori rendah. Desa Mekarmukti dalam menjalankan program Bumdes belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terkendala oleh berbagai hal salah satunya adalah sumberdaya manusia, dengan tidak berjalannya program bumdes ini maka berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya ditandai dengan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kurangnya ruang untuk berinovasi bagi masyarakat.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Demi tercapainya tujuan penulis dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Mekarmukti sesuai dengan harapan seluruh bangsa Indonesia, dan melihat pula adanya permasalahan organisasi bumdes yaitu tidak berjalannya roda organisasi dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia maka penulis mengambil suatu judul artikel mengenai “Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekarmukti Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang.”

B. PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa disebut BUMDES menurut (Peraturan Bupati Sumedang, 2018) Pasal 1 Ayat (9) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dasar pemikiran pembentukan BUMDES adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Adapun tujuan dari pendirian BUMDES adalah :

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mendirikan BUMDES, diantaranya adalah:

1. Atas inisiatif Pemdes dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat desa.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedia sumber daya desa yg belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya SDM yg mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Ketersediaan modal.

Berdasarkan Data Desa Mekarmukti tahun 2019, jumlah penduduknya adalah sebagai berikut:

Laki-laki : 1236 jiwa
Perempuan : 1217 jiwa

Rendahnya angka keluarga pra sejahtera sangat memungkinkan bagi Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera secara keseluruhan. Karenanya, perlu kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan harapan tersebut sebagai bagian dari Visi Kabupaten Sumedang “SIMPATI”.

Kemudian Menurut data pendidikan Aparatur Desa Mekarmukti adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Keadaan Perangkat Desa Mekarmukti
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana	-
2	Diploma	-
3	SLTA	8
4	SLTP	3
5	SD	-
JUMLAH		11

Sumber: Desa Mekarmukti, 2019

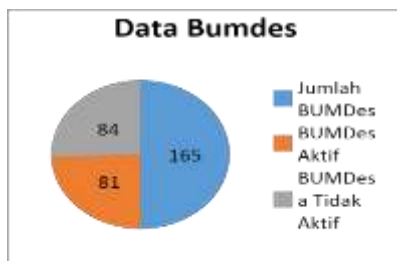
Minimnya sumber daya manusia yang berpendidikan sarjana bagi Aparatur Desa Mekarmukti sangat berpengaruh terhadap

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pemahaman administrasi pada organisasi yang ada di Desa Mekarmukti. Salah satunya adalah Organisasi BUMDES dimana salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan untuk mendirikan BUMDES agar mampu menghasilkan keluaran berupa kesejahteraan masyarakat adalah Sumber Daya Manusia.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Mekarmukti bahwa secara kepengurusan BUMDES telah terbentuk tetapi masih belum bisa berjalan mengingat pemahaman para pengurus tentang pengelolaannya masih rendah sehingga perlu tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Sumedang demi tercapainya Desa Mekarmukti yang sejahtera.

Jumlah Bumdes di Kabupaten Sumedang (Jabarprov.go.id, 2017) berdasarkan laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) Teddy Mulyono, Kab. Sumedang telah memiliki 81 BUMDES aktif dari total keseluruhan 165 BUMDes yang sudah terbentuk di wilayah Pemkab Sumedang. Dari 270 desa di Sumedang, baru ada sekitar 81 BUMDES aktif, dan tentu ini harus dianalisis juga karena keberadaan BUMDES adalah wajib.



Gambar 1. Diagram Data BUMDES

Sumber: Jabarprov.go.id, 2017

Dari 84 BUMDES tidak aktif tersebut permasalahan yang dialami adalah sumber daya manusia. Apabila dilihat dari perspektif ilmu administrasi, Sumber Daya Manusia atau biasa disebut dengan "Man", adalah salah satu unsur yang sangat menentukan dalam roda organisasi. Hal ini dialami oleh BUMDES Mekarmukti, dimana para pengurus BUMDES sangat memerlukan informasi tentang tata cara pengelolaan BUMDES sehingga diperlukan dinas terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan hal-hal pokok dalam pengelolaan BUMDES.

Sebagai sebuah organisasi, BUMDES tentu memerlukan kualitas manusia yang handal, kompeten, dan berkualitas agar proses administrasi bisa berjalan dengan lancar, tertib, efektif, efisien yang bermuara kepada berjalannya BUMDES dalam memberikan kontribusi melalui proses usaha untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara pada lingkup pemerintahan desa.

Manusia merupakan penggerak yang beraktivitas agar tujuan organisasi bisa tercapai yang dengan inovasi, motivasi, dan kreativitasnya menjalankan fungsi-fungsi administrasi yang dimulai dari perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Tanpa manusia maka tidak akan ada kegiatan-kegiatan administrasi (Silalahi, 2011).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2007 bahwa Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. . Namun pada kenyataannya pelaksanaan bumdes di desa mekarmukti belum berjalan walaupun kepengurusannya sudah ada, sehingga pendapatan masyarakat desa mekarmukti tidak sesuai karena mereka yang memiliki kerja serabutan.

Dari masalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola organisasi BUMDES, hal tersebut menyebabkan timbulnya dampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Mekarmukti, diantaranya ialah:

1. Pekerjaan masyarakat yang tidak menetap, Rata-rata pekerjaan yang dimiliki oleh warga desa mekarmukti bukanlah pekerjaan yang menetap melainkan kebanyakan dari mereka memiliki pekerjaan paruh waktu. Diantaranya banyak mereka yang bekerja diladang, bertani, dan pekerjaan-pekerjaan serabutan lainnya disiang hari dan diwaktu lainnya mereka melakukan pekerjaan lain. Sedikit juga diantara warga desa mekarmukti yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Juga disebabkan karena pendidikan mereka yang masih rendah, hal ini menyebabkan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pula timbulnya kesenjangan sosial bagi masyarakat yang hanya bekerja paruh waktu karena dengan tidak memiliki pekerjaan tetap.

2. Kurangnya ruang untuk berinovasi, Dengan pendidikan yang rendah masyarakat desa mekarmukti memiliki hambatan dalam berinovasi, karena kurangnya pengalaman yang dimiliki terkhusus dibidang pendidikan tentunya mereka tidak mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa mekarmukti. Bagaimana dan seperti apa cara mengembangkan bumdes tersebut. Maka dengan adanya penyuluhan mengenai bumdes di desa mekarmukti menjadi langkah awal untuk membuka pemikiran masyarakat desa untuk berinovasi dan meningkatkan keinginan mereka untuk membantu dalam perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

BUMDES pada umumnya mengenai tata kelola dalam mewujudkan BUMDES yang maju serta mandiri yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mekarmukti.

Dasar pemikiran pembentukan BUMDES adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dengan adanya BUMDES ini diharapkan sebagai salah satu jalan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, karena apabila rakyatnya sejahtera maka Desa Mekarmukti akan menjadi desa yang maju.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan BUMDES di desa mekarmukti belum berjalan dengan baik, walaupun kepengurusannya sudah ada namun belum terselenggarakannya roda organisasi secara langsung, hal ini karena minimnya sumber daya manusia di Desa Mekarmukti yang berpendidikan sarjana bagi Aparatur Desa Mekarmukti. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman administrasi pada organisasi yang ada di Desa

Mekarmukti. Salah satunya adalah Organisasi BUMDES mengingat pemahaman para pengurus tentang pengelolaannya masih rendah sehingga organisasi BUMDES sulit berjalan.

Mengingat pentingnya pengelolaan secara administratif ini dapat diharapkan sebagai pencapaian tujuan dengan lebih mudah, karena apabila dilaksanakan dengan tata kelola yang baik maka program BUMDES di Desa Mekarmukti ini dapat dijalankan dengan sebagai yang diharapkan pada tujuan awal.

Tetapi untuk mengatasi masalah tersebut penulis memberikan saran berupa mengadakan penyuluhan BUMDES bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang guna mencapai hasil yang didapatkan agar masyarakat Desa Mekarmukti dapat memahami dan menjalankan organisasi BUMDES demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Mekarmukti.

Masalah sumber daya tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Mekarmukti hal ini ditandai dengan adanya:

1. Pekerjaan masyarakat yang tidak menetap sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang bekerja serabutan, namun apabila program BUMDES ini berjalan maka akan tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Desa Mekarmukti yang mengharapkan, dan
2. Kurangnya ruang untuk berinovasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya, hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Desa Mekarmukti. Apabila berjalannya program BUMDES maka bakat yang dimiliki oleh lapisan masyarakat akan tersalurkan.

Rekomendasi

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Mekarmukti diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang program pemerintah desa dalam menjalankan BUMDES, demi untuk kemajuan dan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- perkembangan desa, serta dapat meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara ikut serta dalam usaha yang dijalankan melalui BUMDES.
2. Bagi perangkat pemerintah Desa Mekarmukti, harus memberikan pengertian dan sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pembentukan BUMDES, dalam rangka untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di desa, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
 3. Bagi pelaku dunia usaha yang ada di Desa Mekarmukti harus memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan BUMDES, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- BPS Kabupaten Sumedang. (2018). *Kabupaten Sumedang Dalam Angka Sumedang Regency in Figures 2018*. Bandung: CV Setia Abadi.
- Desa Mekarmukti. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarmukti*. Sumedang: Desa Mekarmukti.
- Jabarprov.go.id. (2017). Akhir Tahun 2017, Seluruh Desa di Sumedang Dituntut Mampu Membentuk BUMDes. Retrieved September 9, 2019, from <https://jabarprov.go.id/index.php/news/25729/2017/11/08/Akhir-Tahun-2017-Seluruh-Desa-di-Sumedang-Dituntut-Mampu-Membentuk-BUMDes>
- Peraturan Bupati Sumedang. (2017). *Tentang Badan Usaha Milik Desa Nomor 11 Tahun 2017*. Sumedang: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Bupati Sumedang. (2018). *Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Nomor 22 Tahun 2018*. Sumedang: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Silalahi, U. (2011). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.